

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, yang mana pendapatannya masih rendah sehingga pemerintah perlu menitik beratkan prioritas pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pembangunan selama ini diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan semua potensi dan sumber daya yang ada. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini bukan hanya sebagai tujuan dalam meraih kesejahteraan masyarakat, tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu indikator pengukur keberhasilan pembangunan.

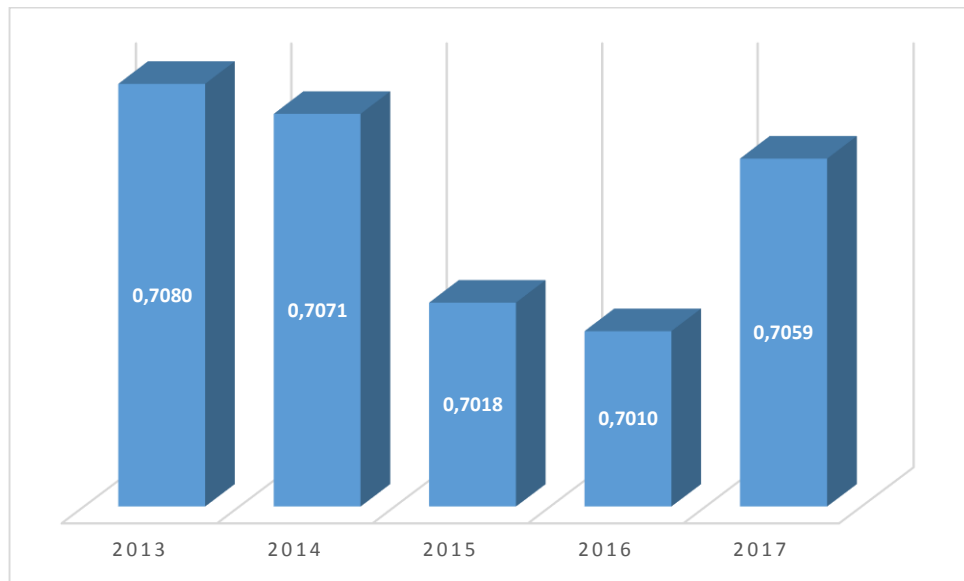
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini tidak merata, hal ini terbukti dari besarnya ketimpangan antar daerah di Indonesia yang masih terus terjadi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih didominasi oleh Pulau Jawa dan Sumatera sebesar 80% dari total PDB Nasional. Hal ini mengindikasikan kurang meratanya pembangunan yang terjadi di Indonesia. Jika ini terus terjadi maka akan mengakibatkan ketimpangan antar daerah yang semakin besar.

Salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi di Indonesia yaitu dengan kebijakan otonomi baru. Pemberian desentralisasi dan otonomi daerah kepada daerah adalah suatu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan

dan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Desentralisasi dan otonomi daerah juga memberikan pendidikan politik bagi masyarakat lokal melalui demokrasi tingkat lokal, yang diwujudkan melalui partisipasi masyarakat. Dengan diberikannya hak dan kewenangan kepada daerah maka diharapkan pemerintah daerah (kabupaten/kota) lebih dekat kepada masyarakat, sehingga pemerintah daerah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat.

Kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan untuk mengarahkan program pembangunan ekonomi agar dapat mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pendapatan melalui kebijakan desentralisasi yang diwenangkan kepada pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya otonomi baru ternyata belum cukup untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi saat ini. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari berkurangnya penduduk miskin dan tingkat pengangguran yang semakin kecil. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah diharapkan dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang luas untuk menekan kesenjangan yang ada.

Salah satu indikator untuk melihat kesenjangan antar wilayah yaitu menggunakan Indeks Williamson. Seperti terlihat pada gambar 1.1, nilai Indeks Williamson mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai 2016 dan mengalami kenaikan pada tahun 2017, namun masih pada kriteria nilai ketimpangan tinggi. Hal ini mengindikasikan tidak meratanya pembangunan antar provinsi di Indonesia.



Sumber: BPS (data diolah)

Gambar 1.1
Indeks Williamson Tahun 2013-2017

Pembangunan regional merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah tetapi juga untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah maju sehingga tercapai konvergensi. Menurut Barro (1992) konvergensi sendiri diartikan sebagai kondisi di mana perekonomian daerah miskin memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dari daerah kaya sehingga *gap* perekonomian antara kedua wilayah tersebut semakin kecil. Konvergensi ini didasarkan pada teori pertumbuhan neoklasik Solow yang mengasumsikan *diminishing return to capital* sehingga pada saat negara maju mencapai kondisi *steady state*, tingkat pengembalian modal tidak akan mengalami peningkatan lagi meskipun terdapat tambahan investasi (Mankiw, 2007). Jadi, ketika negara maju mencapai kondisi *steady state*, negara berkembang akan mengalami pertumbuhan

yang terus menerus hingga dapat mengejar ketertinggalan dari negara maju dan mencapai kondisi *steady state*.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien dan berkelanjutan, maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan wilayah yang lebih memperhatikan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup, serta meningkatkan keselarasan perkembangan antar wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan pertumbuhan, memperkuat integrasi nasional dan meningkatkan daya dukung lingkungan .

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peran penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan sarana infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi ini tidak bisa dipisahkan dalam pembangunan ekonomi. Untuk mencapai hal tersebut, negara memiliki kewajiban untuk membangun sarana dan prasarana umum seperti jalan, jembatan, sistem pengairan, dan sistem kelistrikan untuk mencapai pemerataan. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) anggaran untuk infrastruktur setiap tahun mengalami kenaikan, hal ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan (*gap*) Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur.

Pertumbuhan perekonomian Indonesia 20 tahun terakhir menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 5%. Pertumbuhan terendah sebesar 0.79% pada tahun 1999 dan tertinggi 6.22% pada tahun 2010. Berdasarkan data struktur perekonomian Indonesia secara spasial yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan pertama tahun 2019 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 59.03%, kemudian disusul oleh Pulau Sumatera sebesar 21.36%, Pulau Kalimantan 8.26%, dan Pulau Sulawesi 6.14%. Serta sisanya 5.21% disumbangkan pulau-pulau lainnya yang meliputi Bali dan Nusa Tenggara, Maluku sebesar 3.02% dan Papua sebesar 2.19%. Hal ini mencerminkan disparitas pendapatan yang cukup besar antara provinsi di Kawasan Barat dengan provinsi di Kawasan Timur Indonesia.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, peran investor sangat dibutuhkan untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan diharapkan akan berdampak positif terhadap pembangunan daerah. Berdasarkan data BPS tiga tahun terakhir sektor yang paling diminati investor yaitu sektor industri. Selain itu juga ada sektor lain yang cukup diminati investor yaitu, sektor transportasi, perdagangan dan komunikasi, serta sektor konstruksi. Hal ini dianggap cukup menguntungkan bagi investor. Dengan banyaknya investasi di Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian di Indonesia.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, kinerja perekonomian Indonesia dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan, nilai investasi domestik yang terealisasi sepanjang tahun 2018 mencapai 328.25 triliun

rupiah, terjadi kenaikan 25.25 persen jika dibandingkan tahun 2017. Peningkatan nilai investasi domestik juga diikuti dengan meningkatnya jumlah proyek yang mampu menyerap nilai investasi di tahun 2018, jumlah proyek yang terserap meningkat sebesar 10.815 proyek atau meningkat sebesar 17,67% dari tahun 2017.

Untuk mendukung pertumbuhan investasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Perpres No 13 dan 78 tahun 2010 dan No 12 tahun 2011 untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan agar pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah Indonesia Timur yang masih minim. Selain itu, percepatan pembangunan ekonomi berbasis kawasan juga sudah dimulai dengan membentuk 6 koridor spesifik, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua.

Belum meratanya pembangunan infrastruktur di Indonesia terlihat dari besaran investasi domestik yang terserap menurut wilayah. Saat ini investasi domestik masih didominasi di kawasan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, hal ini karena Pulau Sumatera dan Pulau Jawa memiliki daya tarik bagi investor dan didukung juga dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Sehingga pemerintah berkewajiban untuk percepatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa khususnya di kawasan Indonesia Timur yang masih minim. Agar investor domestik tertarik untuk menanamkan modalnya di luar Pulau Jawa.

Konvergensi adalah proses pengejaran ketertinggalan daerah dengan penghasilan rendah terhadap daerah yang mempunyai penghasilan tinggi. Konvergensi merupakan inti dari teori pertumbuhan sejak tahun 1990an yang

didasarkan pada hipotesis model neoklasik. Konvergensi dibedakan menjadi dua yaitu konvergensi sigma dan konvergensi beta, dalam konvergensi beta terbagi menjadi dua yaitu konvergensi absolut dan konvergensi kondisional. Konvergensi absolut menjelaskan mengenai bagaimana perekonomian daerah miskin memiliki kecenderungan untuk tumbuh lebih cepat dari daerah yang kaya yaitu dengan melihat pertumbuhan PDRB riil per kapita, sedangkan pada konvergensi kondisional dianalisis dengan menambahkan variabel-variabel penjelas lainnya di luar PDRB riil per kapita. Konvergensi sigma menjelaskan mengenai konvergensi antar provinsi dengan melihat standar deviasi dan koefisien variasi pada setiap tahunnya (Kuncoro, 2013). Konvergensi antar daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan daerah, dengan adanya analisis konvergensi maka penyebaran pendapatan per kapita dapat diketahui semakin merata atau tidak.

Menurut Heriqbaldi (2009) konsep pada konvergensi dalam ekonomi setidaknya mencakup dua aspek yaitu konvergensi pendapatan dan konvergensi dalam siklus bisnis. Kedua konsep tersebut secara teoritis dan empiris memiliki perbedaan. Terjadinya konvergensi pendapatan antar wilayah atau negara belum tentu dapat menjamin adanya konvergensi siklus bisnis dalam waktu yang sama, demikian sebaliknya. Pengujian secara empiris diperlukan untuk mengetahui apakah beberapa wilayah mempunyai karakteristik konvergensi pendapatan dan siklus bisnis.

Penelitian mengenai konvergensi antar negara maupun antar provinsi telah lama menjadi perhatian. Penelitian yang dilakukan oleh Yildirim (2006) di Turki,

menunjukkan terjadi konvergensi pertumbuhan ekonomi dengan laju konvergensi yang berbeda. Investasi pemerintah dan swasta tidak berpengaruh signifikan. Penelitian lainnya yang berkaitan dengan konvergensi yang dilakukan oleh Perindy dan Bagaullo (2012) menunjukkan bahwa meski tidak terdapat konvergensi sigma untuk wilayah MENA secara keseluruhan, namun untuk wilayah Jordan dan Aljazair menunjukkan proses konvergensi tergantung pada *Research and Development (R&A)*. Penelitian serupa tentang konvergensi antar provinsi di Indonesia juga pernah dilakukan oleh Fahmi dan Achjar (2015) yang menunjukkan dalam jangka panjang perekonomian Indonesia akan cenderung konvergensi dengan kecepatan 8.08%.

Dari penelitian tersebut, memberikan gambaran bahwa konvergensi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hasil yang berbeda di setiap daerah. Hal tersebut terjadi karena kondisi dan faktor-faktor yang berbeda juga. Untuk itu penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang konvergensi pendapatan dan pertumbuhan di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Konvergensi antar daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan daerah, dengan adanya analisis konvergensi maka penyebaran pendapatan per kapita dapat diketahui semakin merata atau tidak, dengan demikian perlu diketahui apakah terjadi konvergensi absolut, konvergensi kondisional dan konvergensi sigma di Indonesia tahun 2005-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah terjadi konvergensi absolut, konvergensi kondisional, dan konvergensi sigma di Indonesia tahun 2005-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Bagi pembaca

Peneliti ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan, wawasan, serta informasi yang lebih mendalam mengenai pengaruh disparitas

2. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan pembanding atau referensi dalam studi kedepannya yang terkait dengan riset ini dan juga dapat menambah pengalaman dan wawasan dibidang penelitian ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas dan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang digunakan untuk mendeteksi permasalahan yang akan diteliti. Tinjauan pustaka ini berisi teori-teori hasil dari

studi pustaka. Teori tersebut menjadi landasan bagi penulis untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini penulis menguraikan metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan, beserta sumber data.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang dilakukan dan menguraikan deskripsi data penelitian dan menjelaskan tentang analisis data dan hasilnya.

Bab V Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan diambil dari hasil analisis atau intisari dari jawaban atas perumusan masalah yang dipaparkan.